

KONSEP NASIONALISME DAN HAK REPRODUKSI PEREMPUAN: ANALISIS GENDER TERHADAP PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI INDONESIA

*Wening Udasmoro**

ABSTRAK

Tulisan ini melihat model konstruksi hubungan antara konsep nasionalisme dan implementasi program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia dan memahami konsep simbolik tubuh perempuan dalam hubungannya dengan pengkonstruksian nasionalisme tersebut. Tiga rezim yang berbeda, yakni Orde Lama, Orde Baru, dan Orde *Reformasi* memiliki konsep yang berbeda dalam usaha mereka menciptakan *imagined community*. Tubuh perempuan, sebagai entitas yang menjalani KB, menempati peran sentral dalam hal ini.

Kata kunci: Keluarga Berencana - nasionalisme - tubuh perempuan

PENGANTAR

Keluarga Berencana (KB) muncul, antara lain sebagai reaksi terhadap ledakan penduduk yang disadari setelah Thomas Maltus, seorang ahli ekonomi berkebangsaan Inggris mengemukakan teorinya bahwa perkembangan pangan bersifat aritmetis, sedangkan perkembangan populasi bersifat geometris (Anderson, 1991, Yuval-Davis, 2003). Artinya, perkembangan populasi melaju jauh lebih cepat daripada perkembangan pangan. Teori Maltus ditanggapi secara serius oleh bangsa-bangsa Barat yang merasa terancam oleh ledakan populasi dunia, terutama populasi bangsa-bangsa kulit berwarna, yang mayoritas hidup di negara-negara dunia ketiga. Sebagai pemecahannya, diciptakanlah teknologi kontrasepsi yang disebarluaskan hampir ke

seluruh penjuru dunia sebagai upaya untuk mengendalikan populasi mereka.

Gerakan KB di Indonesia muncul sebagai fenomena baru pada awal tahun tujuh puluhan. Gerakan ini dipelopori oleh sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat bernama Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) yang berdiri sejak 1957. Program KB ini kemudian disusul dengan sosialisasi luas dan revolutif lewat intervensi politis pemerintah melalui organisasi yang didirikannya, yakni Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Program KB berkembang sangat pesat dan tetap hidup sampai sekarang meskipun dengan wacana yang berbeda sesuai dengan kebijakan pemegang kekuasaan.

Implementasi program KB di Indonesia yang dalam praktiknya didistribusikan secara

* Staf Pengajar Jurusan Sastra Prancis, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

massal memiliki konsumen tetap, yakni perempuan. Menurut perkiraan, sekitar 30 juta perempuan Indonesia usia reproduksi menggunakan metode kontrasepsi dan merupakan hampir 90% dari keseluruhan pengguna kontrasepsi. Mengacu pada UUD 1945 yang melihat warga negara sebagai suatu entitas netral, dalam arti *melesapkan* adanya segregasi antara laki-laki dan perempuan, dalam praktik implementasi KB terdapat satu indikasi ketidakseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan. Ketidakseimbangan peran ini tidak hanya bersifat individual maupun konjugal, tetapi merupakan sebuah wacana kolektif yang di-institusionalisasikan. Maksudnya, program KB tidak hanya dianggap sebagai urusan individu atau pasangan, tetapi menjadi urusan negara beserta agen-agensya untuk mengimplementasikannya ke seluruh lapisan masyarakat. Wacana kolektif ini lambat laun berubah menjadi bersifat *unconscious* dan bahkan dianggap wajar apabila perempuan yang berkewajiban menjalani program KB. Kepentingan bangsa, pembangunan dan nasionalisme dikatakan akan berhasil karena partisipasi perempuan dalam menyuksekannya. Salah satu bentuknya adalah dengan menjadi peserta KB.

Berpijak pada pendapat T.H. Marshal bahwa *citizenship is a status bestowed on those who are full members of a community and all who possess the status are equal with respect to the rights and duties with which the status is endowed*, (dalam Lister, 1997:14) ada dua pertanyaan yang ingin dikemukakan. Pertama, bagaimana model konstruksi nasionalisme diimplementasikan dalam politik KB di Indonesia? Kedua, bagaimana hubungan antara tubuh, seksualitas dan fungsi reproduksi perempuan dengan konstruksi kebangsaan atau nasionalisme yang merupakan peran setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan? Problematika tersebut bertujuan untuk mengungkapkan secara faktual hubungan reproduksi perempuan dengan konsep nasionalisme yang pada dasarnya merupakan kewajiban dan hak setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan.

SEKSUALITAS DAN NASIONALISME

Dalam karyanya *Histoire de la Sexualité Vol. 1: La Volonté de Savoir*, Foucault berpendapat bahwa seksualitas bukan lagi merupakan fenomena yang harus dihindari untuk dibicarakan, dihukum atau ditoleransi. Namun, seksualitas merupakan fenomena yang diorganisasikan dan diadministrasikan dalam suatu sistem untuk kepentingan tertentu (Foucault, 1976). Salah satu teknik baru kekuasaan adalah munculnya kebijakan ekonomi dan politik dalam hubungannya dengan masalah demografi. Pemerintah tidak sekedar mempertimbangkan konsep rakyat dalam politiknya, tetapi lebih luas lagi, yakni konsep populasi. Konsep ini memiliki fenomena dan variabel-variabel spesifik, seperti natalitas, morbiditas, harapan hidup, fertilitas, kesehatan, penyakit, serta penyediaan makanan. Dalam menghadapi masalah ekonomi, penguasa mempertimbangkan rata-rata jumlah kelahiran dan kematian, usia rata-rata perkawinan dan sebagainya, kemudian memutuskan langkah politik untuk menangulunginya. Negara-negara yang mayoritas penduduknya berusia lanjut, seperti di negara-negara Eropa Barat, memacu penduduknya untuk memiliki banyak anak. Di beberapa negara tertentu, seperti di Jepang, kelahiran anak bahkan mendapatkan kompensasi seperti subsidi dan jaminan-jaminan di berbagai sektor (Yuval-Davis, 2003). Sebaliknya, negara-negara berkembang yang memiliki jumlah kepadatan penduduk sangat tinggi, terutama penduduk usia subur, akan terpacu untuk mengimplementasikan program Keluarga Berencana dalam politiknya. *Government rationality* atau *governmentality* bertujuan untuk memaksimalkan *social defence* atau *security* sebagai upaya untuk mengkonstruksi teknik *power* dan *power/knowledge* yang kompleks sebagai pengawasan, pendisiplinan, dan kontrol terhadap perilaku, baik pribadi maupun kelompok (Foucault dalam Gibbins, 1998). Pemerintah melihat perlunya kontrol terhadap populasi, tubuh, dan reproduksi dengan jalan membangun sebuah *bio power* untuk mencapai keberhasilannya (Foucault, 1976,

Gibbins, 1998). Dengan demikian, seksualitas bukan hanya dilihat sebagai representasi biologis, tetapi juga sebagai fenomena medikal dengan penggunaan teknologi modern untuk mereaksi fenomena-fenomena baru demografi. Jawaban fenomena-fenomena baru tersebut terutama diperoleh dari kemajuan teknologi kedokteran. Penemuan alat kontrasepsi, bayi tabung, dan teknologi kloning adalah contoh jelasnya. Fase ini merupakan fenomena rezim modern *bio politic* yang menempatkan *knowledge, power* dan perangkat aturan terfokus pada tubuh individu dan tubuh sosial yang merupakan sebuah metafora kolektif (Hewitt, 1983)

Teori Foucault tentang *bio power* direferensi oleh para feminis sebagai kritik terhadap para teoretisi nasionalis. Para teoretisi feminis mendefinisikan konsep nasionalisme mereka sebagai sebuah semangat kebangsaan dalam kaitannya dengan masalah konstruksi, produksi, dan reproduksi serta hubungan-hubungan gender. Konteks nasionalisme tersebut merupakan reaksi dan kritik terhadap teori nasionalisme periode awal, seperti teori Gellner (1983), Smith (1986) dan Anderson (1991) yang dianggap mengesampingkan hubungan-hubungan gender (Yuval-Davis, 2003). Menurut Yuval-Davis, ketika para teoretisi nasionalis berbicara tentang produksi dan reproduksi nasional, mereka tidak mengacu pada perempuan, tetapi pada para birokrat negara dan kaum intelektual (Yuval-Davis, 2003). Mereka hanya melihat kaum birokrat dan intelektual sebagai aktor yang memegang peran dalam pengkonstruksian nasionalisme. Mengapa peran perempuan tidak hadir dalam teorisasi dan fenomena nasionalis? Carol Pateman (1989) berpendapat bahwa tendensi ini terjadi karena peran perempuan dilokalisasi di sektor privat. Padahal, menurut Yuval-Davis, tidak hanya para birokrat dan teoretisi yang mereproduksi istilah biologis, kultural, dan simbolis, tetapi perempuan juga berperan besar dalam hal ini. Dengan demikian, menurut hipotesis Yuval-Davis, perempuan terkena dampak proses nasionalis tersebut. Akibatnya, kewarganegaraan perempuan memiliki dualitas. Di satu sisi,

negara selalu mengintegrasikan perempuan dalam keseluruhan aspek politiknya. Di sisi lain, selalu muncul kebijakan yang menempatkan tubuh perempuan terpisah dari prinsip egalitas (Yuval-Davis, 2003). Fenomena ini muncul karena kaum nasionalis berusaha membangun sebuah *imagined communities* (Anderson, 1991). *Imagined communities* ini dibangun lewat peran para individu yang secara kolektif bergerak bersama membentuk sebuah identitas nasional (Otto Bauer dalam Yuval-Davis, 2003). Namun, konsep *imagined communities* yang merupakan tujuan nasionalisme itu sendiri tidak mengindahkan prinsip hubungan gender yang meletakkan perempuan sebagai entitas yang berperan. Nasionalisme yang dibangun negara menggunakan tubuh perempuan sebagai sarana untuk mencapai tujuannya, tetapi tetap mengimplikasikan representasi tubuh tersebut dalam ranah pribadi yang secara politis tidak teridentifikasi.

KELUARGA BERENCANA DAN PEMBENTUKAN NASIONALISME PASCA-KOLONIALISME

Semangat nasionalisme tidak dapat dilepaskan dari era baru pascakolonialisme. Fungsi reproduksi perempuan masuk pula dalam era ini meskipun tidak dapat disangkal bahwa sudah ada penggunaan fungsi reproduksi mereka pada masa-masa sebelumnya. Sebagai contoh, pada masa kolonial Belanda, para ibu, khususnya di Jawa, dianjurkan untuk melahirkan banyak anak yang setelah dewasa dipekerjakan oleh Belanda di perkebunan-perkebunannya di Sumatra maupun di Suriname (Koentjaraningrat, 1994). Fase pertama peran perempuan sebagai sektor produktif dan reproduktif pascakolonialisme terlihat pula pada era Sukarno. Pada masa itu, pemerintahan Sukarno mempertahankan kebijakan kolonial Belanda agar perempuan memiliki banyak anak, tetapi dengan wacana yang berbeda. Jika tujuan Belanda membangkitkan semangat pronatalis untuk tujuan ekonomi sebagai upaya untuk mengembangkan ekspansi politik kolonialnya, Sukarno memi-

liki latar belakang pemikiran yang berbeda. Dia memulai idenya dari sebuah konsep politis sebagai fundamen. Sukarno membangun semangat nasionalisme dengan slogan untuk menyelesaikan revolusi nasional sebagai usaha membangun masyarakat sosialis Indonesia (Boestam, 1964). Konsep masyarakat sosialis ini dianggap dapat tercipta, antara lain dengan bantuan warga negaranya melindungi keutuhan wilayah Nusantara yang kaya raya. Wilayah kaya ini memiliki ribuan pulau yang dua pertiganya adalah lautan yang butuh pengamanan. Traumatisme terhadap penjajahan membawanya kepada suatu ide bahwa jumlah penduduk yang besar merupakan kekayaan untuk pertahanan negara. Untuk itu, para ibu pun diharapkan memiliki banyak anak yang kelak oleh Sukarno dimaksudkan sebagai tameng pertahanan nasional (Koentjaraningrat, 1994). Menurut Sukarno, besarnya populasi bukan merupakan masalah bagi bangsa Indonesia karena Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas. Yang menjadi permasalahan adalah ketidakmerataan penduduk di setiap pulau di Indonesia sehingga Pulau Jawa menjadi pulau yang terpadat di negeri ini. Sukarno berpendapat bahwa transmigrasi merupakan solusi dan upaya untuk meratakan penduduk sekaligus untuk meratakan kekuatan nasional ke seluruh wilayah nusantara.

Pada periode ini, yakni pada 1957, PKBI masuk ke Indonesia. Namun, organisasi ini belum mengikuti arah program organisasi induknya, yakni *International Planned Parenthood Federation* yang berperan membantu mengontrol kelahiran secara internasional termasuk di Indonesia (*The Indonesian Planned Parenthood Association*, 1999). Hal ini tidak luput dari kebijakan politik internal Sukarno serta peran aktor religius yang pada waktu itu belum menerima kemungkinan digunakannya kontrasepsi untuk mengontrol kelahiran. Sukarno berpandangan bahwa KB adalah propaganda bangsa-bangsa Barat yang secara simbolis dan material berusaha memaksakan ide-ide mereka kepada negara-negara pascakolonialisme. Tujuannya adalah untuk mengembalikan kekuasaan neokolo-

nialisme dalam bentuk-bentuk baru. Untuk itu, peran PKBI yang menginduk pada *International Planned Parenthood Federation* yang notabene merupakan representasi ide-ide Barat dibatasi gerakannya. PKBI hanya diberi keleluasaan sempit, misalnya dalam hal promosi kebersihan dan kesehatan.

Keluarga Berencana dimulai di Indonesia sejak masa Suharto. Selain peran PKBI yang semakin nyata dalam mempromosikan Keluarga Berencana, Suharto juga mendirikan sebuah organisasi nasional bernama Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk mendukung program ini. Pada 1970-an, seiring dengan didirikannya BKKBN, para ibu tidak hanya diharapkan menjadi akseptor Keluarga Berencana, tetapi lebih daripada itu. Ada semacam otoritas baru dari pemerintah agar mereka mendukung program ini secara luas. Program KB menjadi propaganda nasional yang berstruktur *top-down*. Artinya, pemerintah melalui BKKBN membentuk jaringan struktural dari atas ke bawah, dari tingkat pusat ke tingkat provinsi, kabupaten serta kota sampai ke kelurahan dan posyandu-posyandu yang tersebar di tingkat-tingkat rukun tetangga. Perempuan dibawa ke suatu lembaga baru Keluarga Berencana dengan orientasi ekonomi dua anak cukup, laki-laki perempuan sama saja. Dikatakan orientasi ekonomi karena propaganda yang diberikan pemerintah mengeksplisitkan suatu keluarga sejahtera yang lebih baik kehidupan ekonominya dengan dua anak dibandingkan banyak anak. Program Keluarga Berencana menjadi program massal dengan perempuan sebagai penanggung jawabnya. Secara statistik terlihat jelas bahwa lebih dari 90% pelaksana Keluarga Berencana adalah perempuan. Perempuan menjadi tumpuan harapan pemerintah untuk menurunkan populasi yang sangat tinggi di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan penurunan signifikan pertambahan penduduk pada masa Sukarno yang berkisar 3,5% menjadi sekitar 2,2% hanya dalam waktu satu dekade. Sejak 1970-an, Indonesia bahkan sudah melatih ribuan delegasi dari 80 negara dalam metode Keluarga Berencana (Crosette dalam Dweyer,

2000). Menurut Bank Dunia, Indonesia merupakan satu contoh impresif dalam transisi demografik di antara negara-negara berkembang (Dweyer, 2000). Selain itu, menurut USAID, agen Amerika yang memberikan banyak dana untuk program pengendalian jumlah penduduk dunia, Indonesia merupakan satu kisah sukses yang tak tertandingi dalam sejarah Keluarga Berencana (Hartman, 1995).

Konsep baru ini merupakan suatu fenomena revolusioner pada waktu itu. Meskipun pelarangan pemakaian kontrasepsi oleh kaum agamawan telah begitu kuat tertancap, Suharto berhasil menginstitutionalisasi Keluarga Berencana menjadi sebuah ide publik baru. Suharto berhasil menundukkan hegemoni kaum agamawan dan mengkooptasi "strategi mengalah" mereka menjadi politik yang sah. Hal ini tentu saja tidak dapat dilepaskan dari intervensi Barat terhadap negara-negara dunia ketiga. Keberhasilan Suharto dalam program KB secara penuh didukung oleh negara-negara Barat sehingga bantuan-bantuan mengalir untuk merealisasikan usaha ini. Bantuan-bantuan seperti USAID dan AUSAID (lembaga milik Australia dengan misi yang sama dengan USAID) terus mengalir. Tujuannya adalah untuk menurunkan secara cepat jumlah populasi di Indonesia yang melebihi 100 juta jiwa pada waktu itu dan diperkirakan melebihi 200 juta jiwa pada akhir abad ke-20 yang dipandang sebagai ancaman terhadap masalah demografi dunia. Perilaku mereka memberikan dukungan material memang dapat dimengerti. Australia misalnya, sebagai negara tetangga dekat Indonesia merasa terancam dengan peledakan populasi ini terutama kekhawatiran akan migrasi orang-orang Indonesia ke Australia. Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang paling gencar melaksanakan propaganda KB ke seluruh dunia tampaknya memiliki kekhawatiran yang sama. Peledakan populasi bangsa berwarna yang dipandang akan membawa keambrokan ekonomi dunia merasa perlu diantisipasi dengan cara mengucurkan dana-dana bantuan untuk memecahkan masalah demografi. Selain itu, lepasnya Indonesia

dari rezim Sukarno yang dianggap pro-Uni Soviet ke Suharto yang cenderung pro-Amerika menyebabkan Amerika memiliki tanggung jawab moral dan material untuk menunjukkan kelebihan ideologi liberal Barat dibandingkan ideologi sosialis.

Seluruh upaya di atas tentu saja tidak terlepas dari tujuan politis Suharto untuk mempertahankan kekuasaannya. Perbaikan serta perkembangan KB yang pesat dijadikan sarana untuk mendapatkan hegemoni penuh kekuasaannya. Keluarga Berencana yang masuk dalam program Pembangunan Nasional Lima Tahun dengan slogan untuk peningkatan ekonomi rakyat menjadi alat untuk mendapatkan kepercayaan rakyat yang mulai merasakan semangat hedonisme dalam kesehariannya. Usaha ini didukung oleh politik internasional yang semakin mengokohkan kekuasaan politiknya hingga kejatuhannya pada 1998.

Program Keluarga Berencana ini pada masa reformasi mendapatkan kritik dari para pemerhati gender di Indonesia. Para feminis beranggapan bahwa program KB dapat tetap dilanjutkan, tetapi pemerintah harus mengubah paradigmanya. Hal ini berkaitan dengan pernyataan Wakil Presiden Hamzah Haz yang berkeinginan menghentikan subsidi alat kontrasepsi. Setelah mendengarkan berbagai kritik dan saran, pemerintah akhirnya mengubah konsep akseptor bagi pemakai alat kontrasepsi KB menjadi konsep *client*. Hal ini berarti bahwa pemerintah mengubah konsep *top-down* menjadi konsep horizontal. Paradigma internasional yang dipelopori oleh organisasi-organisasi internasional yang bergerak di bidang kesehatan reproduksi seperti WHO serta tekanan internasional bahwa Keluarga Berencana adalah suatu hak bagi perempuan dan bukan sebuah paksaan membuat para pengambil kebijakan di Indonesia bersiap memasang rambu baru untuk Keluarga Berencana.

Hanya, masa pemerintahan Suharto selama 32 tahun telah melahirkan sebuah sikap baru bahwa dua anak cukup. Masyarakat secara luas, terutama perempuan sudah begitu terpatrit dengan program tersebut dan menganggapnya sebagai kewajiban

yang normal. Wacana bahwa KB adalah sebuah pilihan masih menjadi wacana kalangan tertentu saja, khususnya kaum intelektual dan feminis. Dua hal tersebut masih dikaitkan dengan kepentingan politik untuk terus mempertahankan tingkat natalitas. Keadaan ekonomi nasional yang mengalami kejatuhan bersamaan dengan jatuhnya Suharto serta jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 200 juta dirasakan sebagai beban oleh pemerintah. Keluarga Berencana masih menjadi harapan, namun di lain pihak pemerintah berhadapan dengan tekanan internasional mengenai masalah hak reproduksi perempuan yang diakui secara internasional. Konferensi Kependudukan dan Pembangunan di Kairo pada 1994 serta Konferensi Perempuan Internasional ke lima di Beijing pada 1995, yang memantapkan perspektif baru mengenai hak reproduksi perempuan, menjadi pedoman yang berusaha untuk diimplementasikan oleh pemerintah dalam kebijakan-kebijakannya.

KELUARGA BERENCANA DAN TUBUH PEREMPUAN

Dari runutan sejarah di atas, dapat dikatakan bahwa dalam penerapan Keluarga Berencana di Indonesia, tubuh perempuan adalah satu objek sama yang dioperasikan oleh tiga kekuasaan yang berbeda. Yang menjadi pertanyaan, mengapa tubuh perempuan? Hal ini karena seksualitas, terutama seksualitas perempuan diyakini sebagai *common-sense cause* dari kelebihan jumlah penduduk dan merupakan sebuah fenomena budaya yang tidak terhindarkan (Dweyer, 2000). Hal ini dikonsepsikan karena perempuan dianggap sebagai grup yang mengalami kehamilan dan kelahiran, dianggap pula bertanggung jawab atas masalah-masalah yang berhubungan dengan fungsi reproduksi mereka. Dengan demikian, fungsi reproduksi ini disorot dari sudut pandang seksualitas grup feminin dan bukan sebagai seksualitas konjugal.

Pembagian konsep publik-privat tampaknya dapat menjelaskan fenomena ini. Pertama, perempuan dianggap menempati fungsi privat yang berhubungan dengan

urusan rumah tangga, pengasuhan anak dan keluarga. Perempuan otomatis dianggap memiliki tanggung jawab mengatur urusan reproduksinya yang merupakan simbolisme kolektif aspek privat perempuan. Di lain pihak, laki-laki yang menempati sektor publik, otomatis dianggap tidak memiliki kewajiban dalam hubungannya dengan reproduksi yang notabene adalah urusan privat. Kedua, transgresi privat-publik yang pada awalnya merupakan parameter konjugal tersebut dilembagakan secara kolektif dengan perantara negara. Negara yang secara *de facto* dan *de jure* dikuasai oleh suara mayoritas laki-laki semakin menekankan simbolisme peran feminin dalam politiknya. Program Keluarga Berencana yang diintegrasikan dalam program-program PKK, Dharma Wanita, Posyandu, semuanya ditujukan untuk konsumsi perempuan. Dalam hal ini seksualitas masuk sebagai *gendered politics* yang menjadi efek *conscious strategies* sebagai upaya menjawab kebutuhan politik dan ekonomi negara (Dweyer, 2000). Fungsi reproduksi perempuan yang pada dasarnya berada di sektor privat, diorganisasikan oleh negara. Fungsi reproduksi perempuan dan seksualitasnya ditempatkan di bawah pengawasan negara dengan propaganda spektakuler yang menunjukkan bahwa perempuan memang harus turut berjuang untuk kepentingan nasional. Yang menjadi permasalahan, kewajiban dengan setengah paksaan itu hanya menjadi simbolisme peran karena tidak didukung oleh pemberian hak terhadap mereka. Hak-hak reproduksi perempuan hanya menjadi sebuah wacana yang luas, tetapi terbentur kepentingan-kepentingan nasional yang dianggap lebih mendesak.

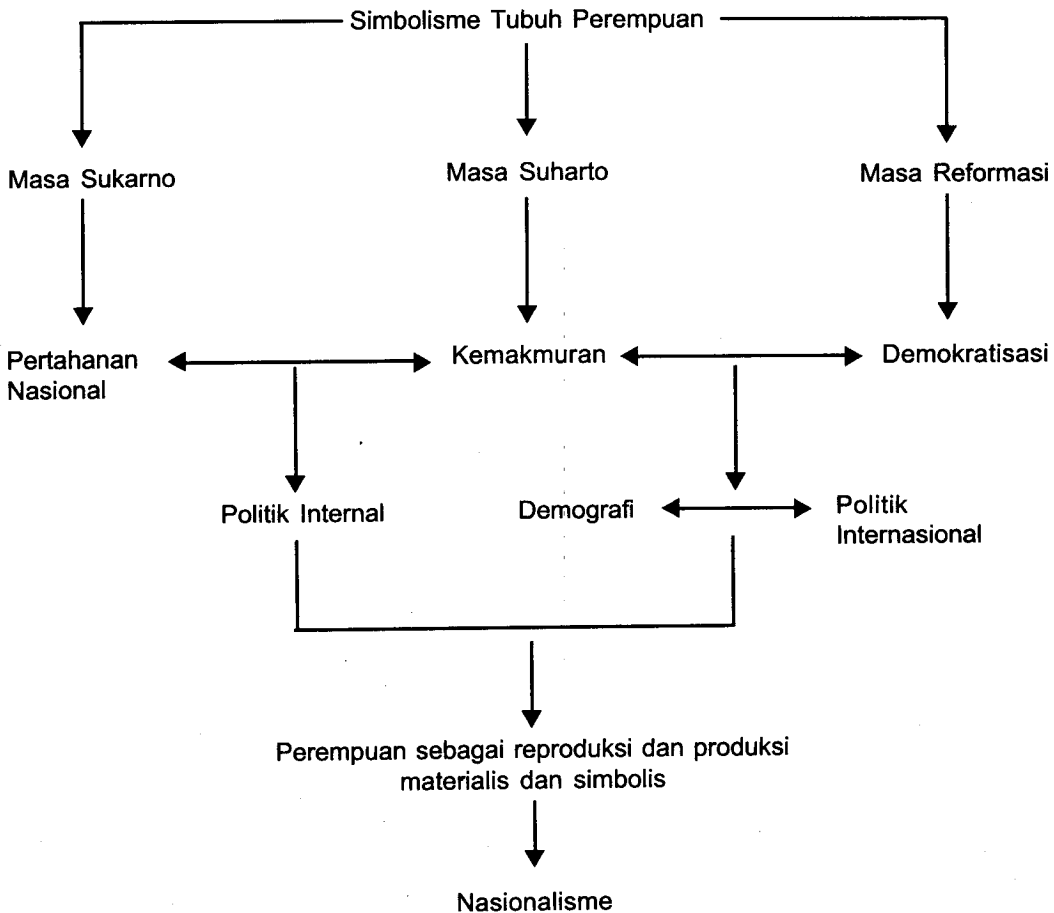
SIMPULAN

Dari uraian di atas terlihat bahwa tubuh dan seksualitas perempuan merupakan sentral dari operasionalisasi program Keluarga Berencana di Indonesia. Tiap era memiliki arah kebijakan dan strategi berbeda dalam menyikapi program ini. Masa Sukarno menekankan prospek pertahanan negara sehingga bersikap menentang kontrol ter-

hadap populasi. Masa Suharto mencoba memperkenalkan konsep kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sehingga mendukung program KB yang dipandang sebagai solusi masalah ekonomi, demografi dan sosial. Meskipun demikian, keduanya memiliki satu arah dalam politik internal mereka, yakni mencoba mengintegrasikan ide-ide, baik pertahanan nasional maupun kemakmuran. Hal ini dilakukan agar mendapatkan dukungan dan kepercayaan luas. Tujuannya adalah untuk menjaga eksistensi kepemimpinan mereka. Tekanan internasional diadopsi pula oleh era Suharto meskipun secara tidak mencolok. Era reformasi, meskipun belum terlihat secara detail perannya, mencoba mengintegrasikan dan menye-

imbangkan kepentingan *internal* dan *eksternal* dalam mengaplikasikan program demokratisasinya. Masalah demografi tetap menjadi perhatian, tetapi tekanan internasional mengenai hak-hak reproduksi perempuan mendapat tempat yang signifikan. Pada akhirnya, tujuan nasionalisme diarahkan kepada perempuan sebagai tubuh simbolis dan material yang berkewajiban menyelesaikan masalah nasional. Dapat dikatakan bahwa perempuan selain sebagai simbol reproduktif juga sebagai pemproduksi secara nyata kepentingan nasional.

Berdasarkan argumentasi di atas, terbentuk sebuah model konstruksi perkembangan diskursus Keluarga Berencana di Indonesia seperti di bawah ini.



DAFTAR RUJUKAN

- Anderson, B. 1991. *Imagined Communities*. London: Verso.
- Boestam, A. 1964. "Uraian Singkat Sekitar Abortus Buatan Ditinjau dari Segi Sosial dan Kemasyarakatan". Dalam *Laporan Lengkap Symposium Abortus*, Jakarta: Ikatan Dokter Indonesia dan Kementerian Kesehatan.
- Dweyer, L.K. 2002, "Spectacular Sexuality: Nationalism, Development and the Politics of Family Planning in Indonesia". In Tamar Meyer (ed): *Gender Ironies of Nationalism: Sexing the Nation*. London and New York: Routledge.
- Foucault, M. 1976. *Histoire de la Sexualité. Vol 1: la Volonté de Savoir*. Paris: Gallimard.
- Gibbins, J.R. 1998. "Sexuality and the Law: The Body as Politics". In Terrel Carver & Veronique Mottier (eds). *Politics of Sexuality*. London: Routledge
- Hartmann, B. 1995. *Reproductive Rights and Wrong: The Global Politics of Population Control*. Boston MA: South and Press.
- Carver, T., and Veronique Mottier (eds). 1998. *Politics of Sexuality*. London: Routledge.
- Gellner, E. 1983. *Nations and Nationalism*. Oxford: Basil Blackwell.
- Hewitt, M. 1983. "Bio Politics and Social Policy: Foucault's Account of Welfare". *Theory, Culture and Society*.
- Pateman, C. 1989. *The Sexual Contract*, Cambridge: Polity Press
- Lister, R. 2002. "Sexual Citizenship", in Isin Enjin, Bujon Turner (eds). *Handbook of Citizenship Studies*. London: Sage.
- Lister, R. 1997. *Citizenship: Feminist Perspectives*. New York: New York University Press.
- Smith, A. 1986. *The Ethnic Origin of Nations*. Oxford: Basil Blackwell.
- The Indonesian Planned Parenthood Association. 1999. *Annual Report*: Jakarta.
- Yuval-Davis N. 2003. *Gender & Nation*. London: Sage Publication